



Buletin Parlementaria

Nomor 1062/IV/VII/2019 • Juli 2019

DPR Sahkan RUU Sisnas Iptek



4TH

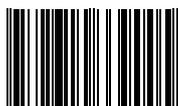
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL



5 Pengelolaan Dana Desa
Masih Bermasalah



15 Kinerja BPJS
Ketenagakerjaan Harus
Ditingkatkan



9 772614 339005

DPR Sahkan RUU Sisnas Iptek



Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto menyerahkan laporan pembahasan RUU Sisnas Iptek kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI M. Nasir. Foto: Kresno/HR

Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Persidangan V tahun 2018-2019 resmi mengesahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menjadi Undang-Undang (UU). Usai mendengarkan laporan dari Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir.

“Apakah RUU tentang Sisnas IPTEK dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang?” tanya Agus yang langsung dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7). Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI M. Nasir dan perwakilan Kemenkum HAM, Kemendagri dan Kemenkeu.

Dalam laporannya, Daryatmo menjelaskan, terdapat kelemahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang perlu digantikan oleh UU Sisnas Iptek ini. Selain belum mengaturnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor dalam tingkat rumusan kebijakan dan perencanaan program anggaran, UU sebelumnya juga belum mengatur secara jelas aspek pembinaan terhadap jaringan SDM Iptek.

“Selanjutnya, perlu ada harmonisasi dengan perkembangan peraturan pemerintah dengan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan sistem keuangan negara dan sisten perencanaan pembangunan nasional. Serta, belum mengatur hal khusus dan strategis seiring perkembangan zaman sehingga belum mampu memberikan kontribusi secara optimal,” tambah

legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Daryatmo memastikan, nantinya RUU ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi esensi utama RUU Sisnas Iptek yang baru disahkan ini. Salah satunya mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan melaksanakan integrasi penelitian antar semua kementerian dan lembaga.

”

TENTU KITA BERUPAYA AGAR UNDANG-UNDANG INI BISA MENJADI NAFAS DAN PEDOMAN BAGI INSAN BANGSA DALAM MEMAJUKAN INDONESIA BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,”

“Pokok selanjutnya adalah yang berkaitan dengan SDM terkait dana, jaminan, perlindungan, dan sanksi. Hal ini akan mengukuhkan bagian ketiga, yaitu hasil penelitian yang menjadi landasan kebijakan nasional atau dikenal dengan *evidence-based policy*,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah II ini bersama sejumlah Anggota Pansus RUU Sisnas Iptek, ketika ditemui wartawan usai Rapat Paripurna.

Dalam kesempatan yang sama, Menristekdikti M. Nasir berharap lahirnya UU Sisnas Iptek ini bisa menjadi nafas dan pedoman memajukan bangsa. “Kita sangat berharap, UU Sisnas Iptek ini nantinya bisa menjadi legitimasi pemerintah dan DPR dalam melaksanakan tugas negara. Tentu kita berupaya agar undang-undang ini bisa menjadi nafas dan pedoman bagi insan bangsa dalam memajukan Indonesia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkas Nasir. ■ alw/sf

Lampung Butuh Alat Deteksi Narkoba

Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menilai perlu pengadaan alat deteksi narkoba di beberapa titik di Provinsi Lampung, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara internasional. Hal ini untuk mencegah maraknya peredaran narkoba di wilayah pintu masuk Sumatera itu. Apalagi Lampung berada di peringkat 8 tingkat nasional, dan peringkat 3 se-Sumatera dalam hal peredaran narkoba.

“Harus segera dipasang alat deteksi narkoba di jalan tol. Seluruh instansi (seperti) Kapolda, Kajati, BNNP, menyampaikan harus dipasang di Bandara Radin Inten II, yang statusnya sudah (bandara) internasional,” ucapnya usai memimpin rapat Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Kakanwil Kemenkumham Lampung, dan Kepala BNN Provinsi Lampung, di Mapolda Lampung, Jumat (12/7).

Azis menambahkan, perlu alat deteksi yang canggih untuk mendeteksi peredaran narkoba di Lampung, khususnya di Bandara Radin Inten II dan jalan tol Lampung.

Bandara Internasional Radin Inten II, yang kini telah berstatus bandara internasional, berpotensi menjadi lubang besar masuknya narkoba. Untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Lampung, instansi terkait perlu memperkuat pengawasan.

“Semoga dalam waktu dekat ini segera selesai terpasang alat-alat pendeteksi narkoba di jalan tol trans Sumatera, pelabuhan-pelabuhan, dan Bandara Internasional di Provinsi Lampung ini,” tandas politisi Partai Golkar itu yang juga menyoroti over kapasitas napi di lapas/rutan Lampung, dan meningkatnya kasus-kasus narkoba yang ada di lapas/rutan.

Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto menjelaskan, banyak napi di lapas yang tersandung kasus narkoba. Pihaknya pun mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait agar mengurangi penyalahgunaan narkoba yang masuk lapas. Sehingga, penegakan hukum juga diimbangi dengan pencegahan yang efektif.

Ia menambahkan, perlu langkah rehabilitasi untuk menangani penyalahgunaan narkoba. “Proses yang berjalan di Polri dan Kejaksaan cukup profesional. Tinggal langkah rehabilitasi pada kasus-kasus yang sifatnya ringan. Bukan berarti kami melindungi pemakai (penyalahguna), tapi mencari solusi ke depan khususnya menangani pidana hukum,” jelas Purwadi. ■ *opi/sf*



Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin bersama Kapolda Lampung dan Kajati Lampung. Foto: Gerald/HR



Buletin Parlementaria

Nomor 1062/IV/VII/2019 - Juli 2019

DPR Sahkan RUU Sisnas Iptek



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P., S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rlyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menyerahkan laporan Komisi I DPR RI kepada Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto: Andri/HR

DPR Setujui 9 Calon Anggota KPI Pusat

DPR RI akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sebelumnya sembilan nama terpilih ini telah ditetapkan oleh Komisi I DPR RI, setelah menyisihkan 25 nama lainnya menggunakan sistem *ranking* untuk menjabat pada rentang waktu 2019-2022.

Kesembilan nama tersebut yakni Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi, Aswar Hasan, Agung Suprio, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Irsal Ambia, Mimah Susanti, dan Mohamad Reza. Usai Laporan dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR RI

Agus Hermanto selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan anggota lainnya.

“Apakah seluruh yang hadir ini dapat menyetujui sembilan nama calon anggota KPI Pusat yang akan bekerja dalam periode 2019-2022?,” tanya Agus yang kemudian langsung dijawab ‘setuju’ secara serempak oleh seluruh pihak yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Dalam laporannya, Satya menjelaskan, Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui tahap uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Maka dari itu, Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika pada 4 September 2018

sepakat memberikan kepercayaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyeleksi calon Anggota KPI tersebut.

“Menindaklanjuti raker dengan Kominfo, mereka membentuk Pansel untuk melaksanakan seleksi yang dimaksud. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2019, Menkominfo telah menyampaikan 34 nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 yang akan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Komisi I DPR RI,” ucap Satya.

Politisi Partai Golkar ini berharap agar sembilan Anggota KPI Pusat terpilih dapat bekerja secara profesional dan independen serta dapat menjaga marwah KPI sendiri. “Komisi I minta komitmennya untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang,” imbuh politisi Partai Golkar itu. ■ er/sf

Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

“Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Anggota BAKN DPR RI Sartono saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Selain itu, tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini, perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, sambung Sartono, antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

“Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan,” legislator dapil Jawa Timur VII itu.

Dikatakannya, atas permasalahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa tersebut, Pemerintah BAKN DPR RI mendorong agar dilakukan optimalisasi peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergitas dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.

Sartono menyatakan, BAKN DPR RI juga mendorong agar pengelolaan Dana Desa dapat menjadi perhatian

dan bahan pembahasan Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai mitra kerja komisi.

“Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa BAKN DPR RI juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2018 dengan memberikan perhatian khusus kepada permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang, dan alokasi afirmasi Dana Desa. ■ dep/es



Anggota BAKN DPR RI Sartono. Foto: Kresno/HR

Komisi II dan KPU Serahkan Santunan Keluarga Petugas KPPS Kota Bekasi



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron dan Komisioner KPU Ilham Saputra menyerahkan santunan kepada keluarga petugas KPPS di Kota Bekasi. Foto: Ayu/HR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyerahkan santunan kepada 10 dari 14 keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bekasi yang meninggal dunia selama tahapan Pemilu serentak 2019 lalu. Menurutnya, sejumlah rencana asuransi sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak.

"Kami menyerahkan penghargaan sekaligus bantuan secara simbolis kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Jauh sebelumnya, sebenarnya kami sudah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan dampak yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serempak ini. Termasuk rencana

diadakannya asuransi terhadap para penyelenggara Pemilu, baik yang permanen maupun yang *ad hoc*," ungkap Herman se usai penyerahan santunan kepada keluarga petugas KPPS di Kantor KPU Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (12/7).

Legislator dapil Jawa Barat VIII ini menilai, evaluasi Pemilu menjadi salah satu agenda mendesak. Termasuk terhadap porsi, beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat Pemilu serentak 17 April lalu. Ia mengakui saat memutuskan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan

harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat. Kami tengah mengevaluasi, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Pemilu jika diperlukan," jelas Herman.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berjanji dalam Pilkada 2020 mendatang, jaminan asuransi bagi petugas KPPS tidak hanya memperhatikan asuransi kematian saja, melainkan juga berfokus pada asuransi kesehatan. Meski hal tersebut masih terganjal pada regulasi.

"Evaluasi Pemilu sendiri rencananya digodok setelah perkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. Mungkin masa sidang nanti setelah 16 Agustus 2019. Intinya DPR, KPU, Bawaslu menyetujui asuransi. Tapi untuk mengalokasikan anggaran negara itu ada aturan dan perundang-undangan. Saat terakhir kami putuskan, terkendala sistem keuangan negara," ujar Herman. ■ [ayu/alw/sf](#)

Semalun Bisa Jadi Sentra Bawang Putih Indonesia

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Semalun merupakan salah satu pusat pengembangan sayuran di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Karena hampir 50 persen pasokan sayuran untuk Mataram berasal dari Semalun. Dari letak geografisnya, Semalun sangat cocok untuk pengembangan tanaman bawang putih nasional.

“Wilayah Semalun dikelilingi oleh bukit dan gunung juga lahan yang sangat luas dan datar, sepanjang mata memandang tertanami bawang putih yang menjadi salah satu prioritas andalan nasional,” ujar Viva saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Semalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, (13/7).

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan bahwasanya Komisi IV DPR RI mendukung Semalun menjadi sentra utama pengembangan bawang putih nasional. Ia berharap Semalun akan bangkit menjadi sentra bawang putih Indonesia sehingga swasembada bawang putih dapat terwujud pada tahun 2021.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 95 persen dari kebutuhan bawang putih secara nasional kita masih bergantung kepada impor. Adapun kebutuhannya rata-rata 450 ribu hingga 500 ribu ton per tahun. “Ini sangat miris, dengan luas lahan yang bisa ditanami bawang putih di negara kita, harusnya tidak impor bawang putih, melainkan sebaliknya kita bisa ekspor bawang putih keluar negeri,” ujar Viva.

Sementara itu, Direktur Perbenihan

Hortikultura Kementerian Pertanian Sukarma menjelaskan, sentra pengembangan bawang putih di Lombok Timur mencapai 10.000 hektar yang tersebar di lima kecamatan yaitu Semalun, Wanasaba, Sikur, Pringgasela dan Suela. Penambahan luas tanam bisa saja terjadi tergantung dengan ketersediaan air (musim hujan).

Sentra bawang putih terbesar ada di Semalun tepat di kaki gunung Rinjani, yang luasnya bisa mencapai 4.000 hektar. Seluruh wilayah ini nyaris tertanami bawang putih dengan pola monokultur dan sebagian tumpang sari dengan komoditas sayuran lainnya. “Melihat prospektif ini, maka Semalun siap menjadi penyangga benih bawang putih nasional dan menyukseskan swasembada bawang putih tahun 2021,” terangnya.

Sebagai bukti keseriusan dan komitmen untuk meningkatkan produksi dan menjaga minat petani untuk menanam bawang putih, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya memfasilitasi bantuan sarana produksi (saprodi) berupa benih dan pupuk. “Pada tahun 2017-2018, telah dialokasikan pengembangan kawasan bawang putih seluas 3.442 hektar,” ujarnya.

Saat ini Kabupaten Lombok Timur terus melakukan perluasan pertanaman bawang putih. “Tidak hanya mengandalkan APBN, namun dengan adanya kebijakan wajib tanam lima persen bagi importir, semakin banyak petani yang bermitra dan menanam bawang putih untuk mencapai swasembada bawang putih 2021,” pungkas Sukarma. ■ man/es



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke pusat pengembangan sayuran Semalun, Lombok Timur, NTB. Foto: Andri/HR

Budi Daya Lahan Gambut Berikan Nilai Tambah bagi Masyarakat

Indonesia memiliki lahan gambut sebesar 12,9 juta hektar di sejumlah provinsi. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki lahan gambut lebih dari 103 ribu hektar dengan luas target restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG) Kalsel 56 ribu hektar. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan, potensi budi daya lahan gambut dapat memberikan nilai tambah atau *value added* bagi peningkat kesejahteraan masyarakat.

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Budi Daya Lahan Gambut di Kalsel, Jumat (12/7), Michael menambahkan, budi daya lahan gambut tidak hanya diperuntukkan untuk tanaman kelapa sawit, tetapi juga dapat diperuntukkan untuk tanaman yang sifatnya holtikultura. Seperti jenis-jenis tanaman holtikultura buah-buahan, sayuran, obat dan bunga.

“Lahan gambut di Kalsel bisa memberikan *value added* kepada masyarakat itu sendiri, sehingga imbasnya kepada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan diversifikasi tanaman, sehingga tidak fokus kepada kelapa sawit yang menjadi tanaman pangan, tetapi bisa juga dari sisi holtikultura dan lain-lain. Kita bisa melihat bagaimana potensi menjadi keuntungan yang maksimal dalam rangka kesejahteraan daripada petani itu sendiri,” kata Michael.

Terkait dengan upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di Kalsel, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi usaha pemerintah dan masyarakat, yakni para kelompok



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Michael Wattimena meninjau Budi Daya Lahan Gambut di Kalsel. Foto: Rizka/HR

petani bersama Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalsel, dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan pupuk Kaltim, melalui pemanfaatan alih fungsi rumput-rumput lahan gambut menjadi pupuk organik.

“Kami melihat bahwa tugas dari pada kebakaran lahan gambut yang sangat sensitif bukan menjadi tugas pemerintah, tetapi masyarakat sendiri itu juga sudah dapat berpartisipasi dalam rangka mengurangi dan menghilangkan kebakaran dengan mengalihkan fungsi rumput-rumput yang berpotensi kebakaran untuk menjadi pupuk organik dan itu sudah ada MoU dengan Pupuk Kaltim,” kata Michael.

Legislator dapil Papua Barat itu menambahkan, Komisi IV DPR RI sangat mendukung budi daya dan pencegahan kebakaran lahan gambut ini, dengan memperjuangkan anggaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk pengelolaan lahan gambut agar ditambah untuk tahun anggaran 2020.

“Ke depan sinergi dalam bentuk revitalisasi harus perlu ditingkatkan dalam bentuk pemberdayaan dari pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah lahan gambut dan anggaran pemberdayaan itu juga harus diberikan serta difokuskan daripada Kementerian terkait,” tutup Michael. ■ qq/sf

Komisi IV Minta Peningkatan Teknologi Produksi Pakan dan Benih BPBAT Jambi

Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pengelolaan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam di Provinsi Jambi, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ia tetap meminta KKP untuk terus melakukan pembinaan kepada BPBAT tersebut agar dapat meningkatkan teknologi yang digunakan serta sarana dan prasarana penunjang yang digunakan untuk menghasilkan benih dan pakan.

“Kita mengapresiasi KKP. Balai ini

perlu kita tingkatkan lagi baik bentuk fisik ataupun lain-lainnya. Karena balai di Jambi inilah yang menyuplai ke seluruh Sumatera. Jadinya kita harapkan pada KKP, khususnya pada Ditjen Perikanan Budidaya untuk membina balai ini yang saat ini sudah kita anggap baik agar dapat menjadi lebih baik kembali,” terang Salim usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau produksi benih dan pakan ikan di BPBAT Sungai Gelam, Provinsi, Jumat (12/7).

Salim berpendapat secara keseluruhan BPBAT Jambi ini sudah memenuhi standar mutu, meskipun begitu ia tetap meminta agar

Rsetiap proses yang ada harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dari benih dan pakan yang tidak hanya didistribusikan untuk wilayah Provinsi Jambi saja, namun memenuhi seluruh kebutuhan benih dan pakan di Pulau Sumatera.

“Saya kira untuk Sumatera sendiri pasti belum cukup. Cuman balai inikan menyiapkan benih-benih unggul agar bisa disuplai ke provinsi lain yang ada di Sumatera. Makanya kita *support* balai ini agar lebih mantap, agar dari sisi pendanaan, fasilitasnya dan lain lain, supaya balai ini benar-benar menunjukkan bisa mengakomodir sepuluh provinsi di Sumatra,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Salim juga menilai keberadaan balai ini sangat positif bagi masyarakat. Sebab, benih dan pakan di balai ini yang bersumber dari dana APBN bisa terasa manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tenggara yang merupakan daerah pemilihannya. Sehingga menurutnya, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung KKP dalam hal pendanaan, sehingga kementerian tersebut dapat terus membuat dan mengoptimalkan program yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita Komisi IV DPR sebagai mitra dari KKP berkewajiban membantu KKP ini terutama pendanaan dan lainnya, agar kalau KKP ini memiliki dana yang cukup secara otomatis bantuan ke masyarakat akan banyak, kalau sudah ada bantuan ke masyarakat tentu masyarakat lebih sejahtera,” tutup legislator dapil Aceh itu. ■ nap/sf



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry meninjau produksi benih dan pakan ikan di BPBAT Sungai Gelam. Foto: Natasya/HR

Peran BPWS Dinilai Belum Maksimal

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) belum maksimal, karena dianggap memperpanjang rantai birokrasi. Untuk itu, Komisi V DPR RI melihat perlu adanya evaluasi mendalam terhadap tugas dan fungsi BPWS.

“Tidak sedikit pandangan sejumlah pihak, termasuk masyarakat bahwa kehadiran BPWS belum maksimal. Hal inilah yang membutuhkan evaluasi yang mendalam,” ungkap Fary saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI bertemu dengan jajaran BPWS di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/7).

Politisi Partai Gerindra itu

menambahkan, BPWS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008. BPWS mempunyai tugas antara lain membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura, kawasan khusus Madura, serta memfasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim.

Di sisi lain, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap BPWS segera memperbaiki struktur organisasi yang selama ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), sehingga pada tahun 2020 dapat dipimpin oleh Kepala. Selain itu, pengembangannya harus bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Madura.

“Kita juga berharap pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi

dapat mempercepat Bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya, yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Suramadu dan sekitarnya,” tutup Fary.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto mengungkapkan, masukan yang disampaikan Komisi V DPR RI dalam bahan perbaikan bagi pihak BPWS. Ia mengungkapkan, pihaknya dituntut berjalan cepat, namun ada hambatan yang menghalangi. Sidik pun menjelaskan hambatan dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Madura (KKJSM) selama ini.

“Pertama, BPWS selama 7 tahun dipimpin oleh Pejabat Plt, lalu bagaimana mau mengambil keputusan. Kedua, kita membutuhkan tanah 600 hektar. Bertahun-tahun kami minta, tapi alhamdulillah sekarang ada 40 hektar,” ungkapnya seraya berharap Komisi V DPR RI bisa terus mendukung pengembangan kawasan Suramadu ini. ■ rmm/sf



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis bertukar cenderamata dengan Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto di Surabaya, Jawa Timur. Foto: Eko/HR

Relokasi Pemukiman Bantaran Sungai Kahayan **Percantik Konsep *Water Front City***

Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengimbau agar sepanjang jalur Sungai Kahayan jangan lagi dibangun pemukiman. Hamka berharap warga di sepanjang bantaran sungai tersebut mau direlokasi. Hal itu disampaikan Rahmat, dengan tujuan agar Sungai Kahayan dapat dipandang menjadi lebih indah dengan berbagai kerlap-kerlip lampu, dalam rangka mempercantik pembangunan konsep *water front city*.

“Sepanjang jalur Sungai Kahayan jangan lagi dibangun pemukiman agar menjadi dapat indah, sehingga mempercantik pembangunan konsep *water front city*. Cita-cita Presiden RI ke-1 Soekarno menjadikan Kota Palangka Raya menjadi modal dan model harus kita wujudkan di era sekarang,” ujar Rahmat, usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan Kalteng ini mendorong adanya peningkatan status dari yang ditangani provinsi menjadi ditangani pemerintah pusat. Rahmat menyatakan, sangat ironis jika Sungai Kahayan tidak masuk dalam penanganan pemerintah pusat mengingat sungai itu merupakan sungai utama di Kalteng.

“Sangat ironis kalau (penanganan) tidak masuk dalam penanganan pemerintah pusat. Kami berkomitmen terus mendorong percepatan pembangunan konsep *water front city* mulai dari area Tugu Soekarno,



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir meninjau Sungai Kahayan, Kalteng. Foto: Puntho/Od

Sungai Kahayan hingga sampai Dermaga Rambang. Kuncinya, jika sungai Kahayan bisa ditangani oleh pemerintah pusat maka hal itu akan menjadi pintu percepatan pembangunan *water front city*,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah memperkenalkan konsep *water front city* serta *progress* penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. “Hal ini menjadi peluang besar untuk Palangka Raya agar mendapat perhatian dan dukungan. Terutama, mensinergikan alokasi APBD, utamanya APBN guna mendukung berjalannya pembangunan konsep pengembangan *water front city*,” harap Umi.

Sementara pada kesempatan berbeda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin usai melakukan

rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Palangka Raya dengan Komisi V DPR RI, dirinya menyatakan sudah secara bertahap melakukan relokasi pemukiman. Fairid menyampaikan, pihaknya memerlukan koordinasi lebih lanjut mengingat hingga saat ini Sungai Kahayan masih ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

“Relokasi pemukiman sudah dilakukan secara bertahap. Kami menyampaikan, perlu adanya koordinasi lebih lanjut mengingat sampai saat ini masih ditangani Pemprov. Kami akan terus berkoordinasi mengenai kemungkinan pengambilalihan kewenangan dari pihak Pemprov kepada Balai Sumber Daya Air (Balai SDA) Pemerintah Pusat,” tutupnya. ■ pun/sf

Tol Laut Dinilai Tak Efektif Tekan Disparitas Harga



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meninjau Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Foto: Anne/HR

Anggota Komisi V DPR RI Johni Allen Marbun menilai program tol laut pemerintah belum efisien. Selain belum mampu menekan disparitas harga, beberapa trayek tol laut juga dinilai tidak tepat sasaran, seperti tol laut trayek Belawan – Lhokseumawe.

“Program tol laut ini bagus, tetapi harus disinkronisasi kembali, supaya sesuai tujuan dan arahan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo,” ungkap Johni Allen di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Kamis (11/7). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau infrastruktur dan transportasi di Sumut.

Ia menuturkan, program tol laut dibentuk untuk menekan disparitas harga logistik maupun barang yang kerap kali terlampaui mahal karena sulitnya akses. Menurutnya, program tol

”

JADI, SAYA KIRA HARUS ADA UPDATE ATAU REVIEW SECARA BERKALA MISALNYA TRIWULAN ATAU ENAM BULAN SEKALI TENTANG TOL LAUT INI. TRAYEK MANA SAJA YANG MASIH BISA DIBIYAI OLEH NEGARA MELALUI PROGRAM TOL LAUT,”

laut lebih efektif di wilayah Indonesia Timur karena disparitas harga menjadi tinggi dibandingkan daerah Jawa pada umumnya.

“Nah, ini Sumatera Utara dan Aceh itu kan bersebelahan, ada

daratan, berbeda dengan Jawa dengan Indonesia Timur. Menjadi pertanyaannya saya adalah komoditas apa yang harus disubsidi biaya transportasinya sehingga perlu menggunakan tol laut ini,” kritisinya.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan terdapat inefisiensi anggaran subsidi tol laut. Karena itu, ia menyarankan agar anggaran tersebut lebih baik direalokasikan untuk pengadaan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan tol laut trayek Belawan – Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada komoditas yang diangkut. Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek tersebut.

Menurutnya, masih ada dua permasalahan utama dalam implementasi tol laut. Pertama, ada trayek tetapi tidak ada komoditas. Sisi lain, ada trayek ada komoditas namun tarif tol laut lebih mahal dibandingkan angkutan ekonomi, sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang.

“Jadi, saya kira harus ada *update* atau *review* secara berkala misalnya triwulan atau enam bulan sekali tentang tol laut ini. Trayek mana saja yang masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut,” tandas politisi PKS ini.

Usai mendengarkan pemaparan, Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga meninjau proyek pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) II Pelabuhan Belawan yang dikelola oleh PT Pelindo I. Turut hadir dalam Kunspek ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono (F-PD), Daniel Mutaqien (F-PG), John Siffy Mirin (F-PAN) dan Sahat Silaban (F-NasDem). ■ ann/sf

Pembangunan Tol Pandaan-Malang Masuki Tahap Akhir

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana menyampaikan, pembangunan ruas jalan Tol Pandaan-Malang di Provinsi Jawa Timur saat ini sedang memasuki target operasi seksi V atau tahap terakhir dan diperkirakan selesai pada Desember tahun ini serta bisa dioperasikan pada Januari 2020 nanti. Untuk itu ia sangat mengapresiasi komitmen kerja pemerintah dalam pembangunan tol ini.

Hal ini ia utarakan sesuai memimpin rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (10/7). Azman menuturkan cepatnya pemerintah saat ini dalam menyediakan pembangunan infrastruktur jalan tol lintas Jawa tidak lepas dari keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Seluruh jalan Tol Lintas Jawa ini pelaksanaannya cukup sukses ya. Ini berkat kinerja yang berkesinambungan dari pemerintah khususnya produk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang memungkinkan pembangunan jalan tol ini bisa terlaksana lebih cepat. Di mana UU tersebut memberikan satu kepastian terhadap pembebasan lahan, sehingga lebih *fair* bagi semua,” ungkap Azman.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, memang sempat terjadi hambatan dalam pembangunan target operasi seksi IV yang menyebabkan terjadinya *delay*, terutama dalam hal pembebasan lahan. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah berarti, karena menurutnya pemerintah telah berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi terbaik, sehingga patut

”

SELURUH JALAN TOL LINTAS JAWA INI PELAKSANAANNYA CUKUP SUKSES YA. INI BERKAT KINERJA YANG BERKESINAMBUNGAN DARI PEMERINTAH.

diberikan apresiasi.

“Dalam pembangunan seksi IV, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan jalan karena ada situs purbakala yang ditemukan. Jadi tidak ditabrak ya, (tapi) dialihkan ke atas sungai. Ada juga masjid yang terkena, maka akan dibuatkan baru,

jadi dengan warga tidak ada masalah. Hanya soal pembebasan lahan rumah saja, tetapi sudah diselesaikan. Seksi IV sudah *finishing*,” timpal politisi dapil Jawa Timur III tersebut.

Azman juga menambahkan bahwa proyek ini konstruksi jalan tol yang dilaksanakan oleh konsorsium PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berjalan cukup bagus. Kemudian yang paling utama, semua perusahaan ini adalah milik pemerintah, sehingga dapat dipantau langsung.

Kunspek Komisi VI DPR RI ke Malang ini diikuti sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI, seperti Mustofa Assegaf (F-PPP), Lukmanul Hakim (F-PKB), Khilmi (F-Gerindra), Linda Megawati (F-PD), Slamet (F-PKS), dan Daeng Muhammad (F-PAN). ■ *er/sf*



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana tinjau Tol Pandaan-Malang. Foto: Erlangga/HR

Tol Pekanbaru - Dumai Didorong Segera Selesai

Pembangunan tol Pekanbaru - Dumai didorong secepatnya untuk diselesaikan. Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu meminta pemerintah untuk segera mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk pembangunan jalan tol ini, agar pembangunannya berjalan lancar. Utama Karya (HK) selaku penanggung jawab pekerjaan tol ini mengandalkan pendanaan dari pinjaman Bank Mega sebesar Rp 6,5 triliun.

“Sampai saat ini, alokasi PMN yang diberikan tahun 2018 - 2019 sebesar Rp 3 triliun dan Rp 10,5 triliun ini belum cair. Mereka berharap betul PMN ini bisa cepat cair untuk lebih mengamankan operasional dari jalan tol ini,” ujarnya usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi Utama Karya (HK) dan

”

DENGAN ADANYA TOL PEKANBARU – DUMAI INI, DIKLAIM PERJALANAN DAPAT DITEMPUH DENGAN WAKTU 6 JAM.

jajarannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (10/7).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, seharusnya bank-bank BUMN lebih banyak andil dalam memberikan bantuan kredit untuk jalan tol lintas Sumatera, khususnya jalan Tol Pekanbaru-Dumai. “Bank swasta bisa andil memberikan pinjaman. Kenapa bank- bank Pemerintah tidak turut andil

dalam pengerjaan pembangunan tol ini,” imbuh Iskandar.

Di sisi lain, dalam pertemuan terungkap, kendala pembangunan tol ini adanya jalur pipa gas milik PT. Cevron yang belum dipindahkan. Pipa gas itu berada di jalur yang akan dibangun jalan tol. Saat ini masih dalam proses pembicaraan dengan SKK Migas dan PT Cevron. “Kami berharap ada solusi terbaik untuk proses pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai,” kata politisi dapil Jawa Timur X ini.

Diketahui, selama ini perjalanan Pekanbaru - Dumai harus ditempuh selama 12 jam melalui jalur provinsi. Dengan adanya Tol Pekanbaru – Dumai ini, diklaim perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 6 jam. Dengan begitu masyarakat sekitar bisa menyingkat perjalanan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ■ azk/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan Tol Pekanbaru – Dumai. Foto: Azka/HR

Besaran Polusi PLTU Tanjung Jati B Harus Diperhitungkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memberikan apresiasinya atas kinerja PT. PLN, dalam hal ini PLTU Tanjung Jati B Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang telah mampu menghasilkan listrik sebesar 4800 megawatt. Diketahui, dalam menghasilkan listrik PLTU Tanjung Jati B menggunakan sumber energi batubara sebesar 70 persen serta energi lain seperti gas, diesel dan solar sebanyak 30 persen.

Besarnya energi batu bara yang digunakan yakni 8 juta ton per tahun, membuat Ridwan mengingatkan perlunya koefisien yang harus dihitung dan berapa polusi yang dihasilkan. Menurut Ridwan, besarnya polusi yang dihasilkan akibat pengolahan batu bara itu harus dihitung, agar masyarakat tidak terganggu polusi

udara yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu, penimbunan yang dilakukan PLTU Tanjung Jati B terhadap batu bara, agar jangan sampai mengganggu masyarakat.

“Tujuh puluh persen batu bara yang digunakan, atau 80 juta ton ini harus dihitung berapa polusi yang dihasilkan, karena masyarakat yang dibebani polusi tersebut. Saya juga meminta setiap batu bara yang ditimbun itu harus didinginkan dengan teknologi yang ada sehingga tidak mengganggu masyarakat,” ujar Ridwan Hisjam saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, Jumat (12/7).

Namun tantangan yang dihadapi PLTU Tanjung Jati B tersebut nampaknya direspon cepat oleh sinergi yang baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berhasil membangun sistem baru untuk menangkap partikel-partikel yang mengandung polusi akibat batu bara tersebut, sehingga tidak langsung tersebar di masyarakat.

Adapun wajar apabila PLTU Tanjung Jati B mendapat Proper Hijau. ■ hs/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam.
Foto: Hendra/HR

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Harus Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perluasan jumlah peserta dan performa kinerja program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu pengawasan terhadap pelaku

usaha juga harus dilakukan secara lebih intens agar mereka mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan Putih usai menerima penjelasan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel dan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan saat Kunjungan Kerja Spesifik Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Makassar, Sulsel, Selasa (16/7).

“Kalau dari segi kinerja, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan harus terus ditingkatkan. Kalau dari perluasan peserta, sebagaimana disinggung Pemerintah Daerah Sulsel, mereka menyampaikan bahwa masih jauh dari jumlah pekerja. Sehingga perlu terus ditingkatkan juga terkait pengawasan kepada para pelaku usaha untuk bisa mendaftarkan para pekerjanya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Selain kinerja BPJS Ketenagakerjaan dari segi perluasan peserta,

Putih juga meminta perbaikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dari segi program CSR. Mengingat program CSR yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Sulsel dinilai tidak tepat sasaran, oleh karena itu perlu dibuat sebuah regulasi yang mengikat agar rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas itu harus dilaksanakan dengan baik.

“Tentunya perlu diperkuat, saya kira dengan payung hukum juga termasuk dengan permasalahan investasi yang ada itu. Sehingga manfaat bisa sebesar-besarnya untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, kita akan merekomendasikan adanya regulasi yang bisa mengikat program CSR tersebut. Sehingga CSR yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu luas dan umum,” jelas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu. ■ hs/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Hendra/HR

Ditjen Gakkum Diminta **Selidiki Dugaan Pencemaran Limbah PT. Semen Padang**



Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir sidak PT. Semen Padang, Sumatera Barat. Foto: Arief/HR

Anggota Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Ferry Kase meminta agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelidiki dan menindaklanjuti pengelolaan limbah milik PT. Semen Padang yang diduga mencemari lingkungan dan pemukiman warga.

Demikian diungkapkan Ferry ketika mengikuti inspeksi mendadak (sidak) bersama Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dan Direktur Tindak Pidana Ditjen Gakkum KLHK ke PT. Semen Padang, Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini.

“Pengelolaan limbah harus ada sebuah proses penadahan dan penampungan yang layak untuk keluar kemudian dibuang dan sisa-sisa limbah itu bisa dibuang ditempat lain. Namun ini dibuang langsung ke lingkungan, sehingga kita meminta kepada pihak Gakkum Kementerian LHK untuk menindaklanjuti pengolahan limbah PT. Semen Padang,” terang Ferry.

Politisi Fraksi Partai Hanura ini mengatakan, secara umum PT. Semen Padang terlihat bagus dan bangunan pemukiman pabrik berada di ketinggian. Namun bila dicermati di hilir dari pembuangan, limbah sisa proses pengolahan terbuang begitu saja tanpa diolah menggunakan teknologi agar limbah tersebut layak dibuang.

Ia menegaskan, pengelolaan limbah ini harus dipantau dan dilakukan penyelidikan lebih jauh termasuk pantauan udara. Saat melakukan sidak, Tim Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI melihat lingkungan perkampungan dan pepohonan berdebu serta di atap bangunan pabrik banyak material tumpahan yang keluar dan tidak tertutup dengan baik.

“Ini akan menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena apabila musim hujan material limbah yang masih mengandung zat berbahaya seperti batubara dan gypsum akan tercampur dan terbawa ke lingkungan alam sekitar,” tandas legislator dapil NTT itu. ■ afr/es

SBMPTN Sistem UTBK Perlu Dievaluasi

Memasuki tahun 2019, bagi pelajar yang ingin mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Sistem ini menemui banyak kendala di lapangan, sehingga ke depan UTBK ini perlu di evaluasi secara mendalam.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Jambi (Unja) Johni Najwan beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Jambi, Kepala LLDIKTI Wilayah X, Kepala Lembaga Layanan Tes Masuk Perguruan Tinggi (L2TMPT) Jambi, Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Ruang Senat Unja, Jambi, Kamis (11/7).

"Setelah mendengarkan pemaparan Pak Rektor, semakin jelas bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 ini perlu dilakukan pengkajian secara mendasar terhadap penerimaan UTBK. Yang mana UTBK ini berbasis komputer, sementara di daerah-daerah sarana dan prasarannya kurang. Jangankan bicara komputer, listrik kita ketahui hidup mati. Kalau tidak hidup mati, kata Pak Rektor, itu namanya bukan PLN," kata Sutan.

Secara topografi, ditambahkan Sutan, kondisi daerah tidak bisa disamakan dengan kota. Seperti halnya Jambi yang wilayahnya luas dan jarak tempuh

dari kabupaten menuju kota, sangatlah jauh. "Misalnya datang dari Kerinci ke Jambi, datang dari Muara Sabak ke Jambi, sampai di Jambi mau UTBK lampunya mati, kan kasihan kalau harus tengah malam. Jadi sejalan dengan hal itu memang sarana dan prasarana perlu lebih dulu disiapkan, baru demikian bisa kita lakukan UTBK ini ke depan," saran politisi Partai Gerindra ini.

Politisi dapil Jambi ini juga mengkritisi pelaksanaan UTBK, dimana hasil ujian baru diumumkan setelah 10 hari. Padahal seharusnya, bila benar-benar berbasis komputer, hasil ujian bisa dilihat oleh peserta saat itu juga. "Artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan demi penyempurnaan. Tentu kami Komisi X DPR RI Insya Allah akan melaksanakan Raker dengan Kementerian terkait, agar adanya perbaikan ke depan. Karena pendidikan kita harus menjadi terdepan, karena kita ingin SDM yang berkualitas dan berkeadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Jambi Johni Najwan memaparkan beberapa permasalahan yg terjadi di lapangan terkait pelaksanaan UTBK. Dimana, tidak semua universitas memiliki sarana dan prasarana komputer yang banyak. Pihak universitas bekerja

sama dengan sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium komputer, jaraknya pun cukup jauh dari Unja.

Ke depan, ia juga berharap agar UTBK dijadikan opsi (pilihan) dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Selain membutuhkan *cost* (biaya) yang tinggi, efektifitas UTBK pun masih kurang karena hasil ujian bisa diketahui setelah 10 hari. "Kami berharap kalau UTBK diterapkan secara *general* dan menyeluruh, harus betul-betul UTBK dengan hasil bisa dilihat saat itu juga. Bukan seperti UTDK (Ujian Tulis Dengan Komputer) yang pengumumannya sampai 10 hari. Saya berharap kedepannya UTBK hanya opsi, bukan kewajiban," pungkasnya.

■ es/sf

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Sutan Adil Hendra.
Foto: Erman/HR



SBMPTN Sistem UTBK Temui Banyak Permasalahan

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakhri menjelaskan, memasuki tahun 2019, bagi pelajar yang ingin mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

“Sistem ini menemui banyak kendala di lapangan, sehingga ke depan UTBK ini perlu dievaluasi secara mendalam,” kata Fikri saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Universitas Padjajaran, Rektor UPI Bandung, Rektor Universitas Siliwangi, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Kepala LLDikti Wilayah IV Jawa Barat, serta LTMPT Provinsi Jabar, di Bandung, Jabar, Kamis (11/7).

Untuk diketahui, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN difokuskan berdasarkan prestasi dan portofolio calon mahasiswa. Sedangkan SBMPTN difokuskan pada seleksi hasil ujian tertulis dengan memanfaatkan UTBK dan Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC). Sementara Seleksi Mandiri difokuskan pada seleksi yang diatur oleh masing-masing PTN serta bisa memanfaatkan nilai hasil SBMPTN.

Politisi PKS ini menambahkan, berbagai catatan pada penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019 ini harus dikomunikasikan dengan Kemristekdikti. “Persentase siswa ke PTN banyak yang didominasi jurusan IPA. Fakultas Ilmu Sosial pun

dimasuki oleh siswa yang jurusannya IPA. Jadi kita harus serius untuk masalah pendidikan. Kita tidak boleh mendiadakan segala masukan dan keluhan yang ada sejak penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketiga jalur itu wajib mendapatkan evaluasi dan masukan,” ungkap Fikri.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuran mengatakan, penerimaan mahasiswa dari tahun ke tahun selalu permasalahan. Penyebabnya bukan karena pemerintah tidak bekerja baik atau DPR RI tidak memperjuangkan berbagai kebijakan. Menurutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia luar biasa, sehingga bonus demografi itu tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur dan peralatan yang harus disiapkan PTN, dan PTS yang juga masih menghadapi masalah-masalah seperti itu.

“Jadi titik beratnya karena infrastruktur. Perlengkapan-perengkapan, baik itu secara fisik

belum memadai. Akhirnya setiap tahun banyak yang *drop out*. Karena memang infrastruktur yang kurang. Oleh karena itu pemerintah yang didukung oleh DPR membuat kebijakan-kebijakan minimal mengatasi persoalan itu. Selama APBN masih defisit, sulit untuk mengatasinya. Bagaimana bisa membangun infrastruktur pendidikan jika uangnya tidak ada,” tegas politisi Partai Golkar itu. ■ hr/sf



Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Fakhri.
Foto: Eka Hindra/HR



Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Harus Penuhi Prinsip Keadilan



Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad. Foto: Devi/HR

Sistem penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi.

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menyampaikan, penerimaan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah pola seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 bagi SMA/MA, dan SMK dengan masa belajar 3 tahun, atau semester 1 sampai semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun, serta portofolio akademik.

“Penilaian SNMPTN juga dilihat dari indeks sekolah dan prestasi alumni.

Intinya, semua penilaian SNMPTN adalah tanpa tes,” ucap Noor Achmad saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan *stakeholder* bidang pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulsel, Kamis (11/7).

Sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang umum, yakni menggunakan nilai ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN. “Pada SBMPTN, nilai semasa SMA tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah nilai dari hasil ujian masuk PTN. Sistem penilaian SBMPTN dilihat dari jawaban. Jika benar mendapat 4 poin, jawaban salah dikurangi 1 poin, dan kosong tidak mendapatkan poin,” paparnya.

Berbeda dengan SBMPTN tahun 2018, sambung legislator Fraksi Partai Golkar itu, pada SBMPTN tahun 2019

ini dilakukan tes terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya untuk mendaftar ke PTN. “Nilai dari tes inilah yang akan digunakan untuk mendaftar ke Universitas dengan program studi diinginkan,” imbuh Noor Achmad.

Secara resmi pelaksanaan SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2019 telah dilaksanakan. SNMPTN telah selesai pada bulan Maret 2019, sedangkan SBMPTN sudah diumumkan hasilnya pada 9 Juli 2019 lalu. Komisi X DPR RI mencatat, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kesiapan sekolah atas jalur penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN.

“Diantaranya proses pelaksanaan SNMPTN yang hanya dilakukan secara *online* sangatlah mengandalkan sarana dan prasarana teknologi informasi sekolah. Sementara banyak SMA dan sederajat di Indonesia yang belum memiliki sarpras teknologi informasi yang baik untuk mengikuti proses pengisian dan verifikasi PDSS (Pangkalan Data Siswa dan Sekolah). Sehingga hal ini dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya sekolah dalam pengisian PDSS,” papar Noor Achmad.

Selain itu, lanjut Noor, yang menjadi masalah lainnya yaitu terkait posisi geografis Indonesia yang tersebar dan keberadaan daerah yang masih sering mengalami bencana. Ia menyatakan, belum lagi mengenai keberpihakan Pemerintah Daerah, khususnya pada suasana pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi yang belum sepenuhnya berjalan baik, hal itu juga mempengaruhi proses validasi data sekolah yang akan diunggah melalui sistem PDSS. ■ dep/es

UGM Berperan Bantu DPR Tetapkan Calon Anggota BPK

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Guru Besar dan *civitas academica* Universitas Gadjah Mada (UGM) berperan penting membantu DPR RI dalam menetapkan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbaik dan beredukasi tinggi, sehingga dapat membuat kinerja BPK lebih baik lagi.

“BPK ini lembaga yang bertugas mengaudit lembaga tinggi lainnya. Tentu calon pimpinannya harus yang memiliki latar belakang akuntansi. Makanya kita meminta UGM yang ahli akuntansi untuk membantu kita,” Agun usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kampus UGM, Di Yogyakarta, Senin (15/7). Kunspek ini dalam rangka meminta masukan terkait seleksi Anggota BPK periode 2019-2024.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, UGM sudah dipercaya DPR RI dalam membantu proses seleksi calon pimpinan tinggi instansi yang ada di Indonesia. “Ketika proses penetapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), UGM juga membantu dalam proses seleksinya. Mereka dipercaya untuk turun langsung melakukan *fit and proper test* dan mereka sudah memilih namanya, tetapi tetap yang memilih DPR langsung,” imbuh Agun.

Agun mengharapkan agar ke depannya UGM terus membantu DPR RI, khususnya Komisi XI DPR RI dalam memilih calon pimpinan lembaga tinggi negara. Tidak lupa Agun juga mengapresiasi berbagai masukan UGM terhadap seleksi pimpinan tinggi di Tanah Air. “Apresiasi yang luar biasa untuk UGM. Mereka

memberikan masukan yang mendasar dan bersifat teoritis dan filosofis,” ungkap legislator dapil Jawa Barat itu. ■ **tn/sf**



Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Foto: Taufan/HR

Komisi XI Ingin Calon Anggota BPK Kuasai Persoalan Keuangan Negara

Proses pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024 saat ini sudah terseleksi menjadi 32 orang dari 64 pendaftar. Untuk itu, Komisi XI DPR RI terus mencari masukan dari

berbagai *stakeholder* agar kelaknya Anggota BPK RI yang terpilih benar-benar cakap dan menguasai persoalan keuangan Negara.

“Kita saat ini sedang melakukan berbagai upaya dengan meminta masukan-masukan dari *stakeholder*, sehingga kami berharap akan terpilih Anggota BPK RI yang menguasai persoalan tugas BPK RI sebagai seorang auditor. *Insyallah* target kami akhir agustus tahun ini pemilihan calon Anggota BPK RI selesai,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Elviana usai pertemuan dengan sejumlah Akademisi di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (16/7).

Politisi F-PPP ini menambahkan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta pendapat kepada para akademisi kualifikasi atau syarat tambahan yang diperlukan bagi calon Anggota BPK RI. “Salah satunya

terkait persyaratan orang-orang yang bisa masuk Anggota BPK RI. Karena rata-rata tiap periode pendaftar lebih dari 60 orang, bisa dibayangkan, dalam sehari kami paling banyak bisa menguji 5 orang. Kalau ada 64 orang, berarti butuh sekitar 12-13 hari,” ujarnya.

Menurut legislator dapil Jambi ini, selama ini banyak pendaftar yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor. Ia mencontohkan bahwa sebelumnya ada peserta yang tidak paham mengenai manajemen keuangan, dan bukan berlatar belakang akuntansi. Oleh sebab itu kemarin (seleksi Anggota BPK RI periode 2019-2024), Komisi XI DPR RI membuat sistem makalah untuk para pendaftar.

Selain itu, adanya juga usulan dari Presiden agar membentuk Panitia Seleksi (Pansel) BPK RI, “Saya setuju, tetapi harus dari usulan Anggota DPR RI, jangan dari presiden. Karena jika presiden yang membentuk, akan melanggar UU dasar 1945,” tutup Elviana. ■ **jk/es**



Anggota Komisi XI DPR RI Elviana. Foto: Jaka/HR

Perlu Kesepakatan Perihal Kelembagaan dalam RUU Kewirnas

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Martri Agoeng menjelaskan bahwa salah satu hal krusial dalam pembahasan RUU Kewirnas adalah belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI mengenai permasalahan kelembagaan.

“Pembahasan paling krusial, tinggal masalah kelembagaan. Kalau tidak ada lembaga pelaksana khusus menangani hal ini dan masih tersebar di berbagai kementerian, indikator keberhasilannya tidak jelas. Kami menginginkan, lembaga pelaksana ini langsung di bawah presiden, sehingga eksekusi terkait UU Kewirnas nantinya bisa dilaksanakan dengan cepat,” kata Martri saat memimpin Tim Kunker Pansus RUU

Kewirnas di Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/7).

Martri mengungkapkan banyak masukan dari berbagai *stakeholders* di Provinsi Aceh yang dapat dimasukkan secara normatif ke dalam RUU Kewirnas. “Saya minta kepada seluruh *stakeholders* di Provinsi Aceh untuk menyusun norma yang dapat dimasukkan ke dalam RUU Kewirnas agar mereka juga dapat melakukan *follow up* dalam proses pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh,” jelas Martri.

Terkait permintaan perlakuan khusus kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Martri menjelaskan bahwa dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Aceh sudah cukup besar. Bahkan Aceh juga memiliki

anggaran dalam otonomi khusus. Namun, penting untuk memperkuat komunikasi antar lembaga agar terjadi efektivitas dalam proses pendampingan dan pengembangan UMKM.

“Pendampingan dan pengembangan UMKM secara otonomi pun bisa dilakukan, tanpa harus menunggu dari pusat. Anggaran APBN sudah cukup besar di Aceh, hanya belum terkonsolidasi saja,” jelas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu..

Pansus RUU Kewirnas berharap agar masyarakat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola UMKM yang ada. “Bagaimana meningkatkan kemampuan SDM dan akses pasar dari hulu sampai hilir. Kedua hal tersebutlah yang harus terus dikawal oleh Pemerintah Daerah, khususnya Provinsi Aceh,” tutup Martri.

■ ica/es



Wakil Ketua Pansus RUU Kewirnas DPR RI Martri Agoeng memimpin Tim Kunker Pansus RUU Kewirnas di Kantor Gubernur Aceh. Foto: Tiara/HR

Perlu Paradigma Baru untuk **Kembangkan Kewirausahaan Nasional**

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan, saat ini iklim usaha dalam negeri memerlukan paradigma baru untuk mengembangkan kewirausahaan nasional. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Pansus Kewirausahaan Nasional ke Provinsi Bali.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan dengan didukung oleh hukum pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Gde saat memimpin

rapat bersama para pamangku kepentingan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/7).

Gde yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI menjabarkan bahwa, pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif.

Ia menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan SDM. Kewirausahaan nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi.

Anggota Banggar DPR RI ini mengungkapkan beberapa isu krusial dalam Pembahasan RUU ini, yang masih *pending* (tertunda) dan

”

KEWIRAUSAHAAN NASIONAL MERUPAKAN SEMANGAT, SIKAP, PERILAKU, DAN KEMAMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH DAN MENERAPKAN KREATIVITAS DAN INOVASI.

memerlukan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI mengenai kelembagaan dan pembiayaan, yaitu pemberian insentif bagi wirausaha seperti pengenaan pajak, legalitas, dan beberapa hal lainnya.

RUU tentang Kewirausahaan Nasional kini telah memasuki 11 kali masa sidang. Saat ini proses Pembahasan RUU tentang Kewirnas sudah sampai pada tahap Tim Perumus (Timus), namun pembahasan dalam Timus ini terhenti karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR mengenai masalah kelembagaan.

Pansus RUU Kewirnas menggelar Rapat Kunjungan Kerja Spesifik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian. Juga diikuti oleh Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi, asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bali, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali, serta akademisi dari Universitas Udayana. ■ eko/es

Anggota Pansus RUU Kewirnas DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Eko/HR



BURT DPR Minta RS. Grestelina Miliki Alat Deteksi Dini Kanker



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso memimpin Tim Kunjuran BURT DPR RI meninjau pelayanan Jamkestama di RS Grestelina, Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Rhyani/HR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) di Rumah Sakit (RS) Grestelina dari segi pelayanan terhadap Anggota DPR RI beserta keluarga sudah berjalan dengan baik. Namun ia meminta agar ada penambahan alat tes deteksi dini kanker di RS tersebut.

“Tes deteksi dini kanker sangat diperlukan untuk mengetahui sejak dini apabila terdapat kanker dan segera mengobati sakit kanker tersebut, saya harap RS Grestelina memiliki alat-alat tersebut meskipun biayanya sangat mahal,” harap Agung saat memimpin Tim Kunjuran Spesifik BURT DPR RI meninjau pelayanan Jamkestama di RS Grestelina, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/7).

Makassar sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Selatan dan menjadi kota penghubung di Indonesia timur, seharusnya memiliki rumah sakit dan fasilitas yang lengkap. Fasilitas tersebut tidak hanya berguna untuk Anggota DPR RI melainkan untuk masyarakat setempat juga. Agung bercerita terkait wafatnya Ibu Ani Yudhoyono yang meninggal karena penyakit kanker.

“Deteksi dini kanker sangat penting, Bu Ani yang menjadi Ibu Negara selama 10 tahun baru terdeteksi penyakitnya ketika sudah stadium empat. Padahal selama menjadi sebagai Ibu Negara, perhatian dari negara untuk kesehatan sudah sangat maksimal. Namun ternyata baru terdeteksi di stadium akhir, kami sangat kehilangan sosok Ibu Ani,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Anggota BURT DPR RI Aliyah Mustika Ilham menilai pelayanan

RS. Grestelina perlu ditingkatkan.

“Selama ini belum pernah kami temukan keluhan dari Anggota DPR RI terkait pelayanan RS. Grestelina Makassar. Dari anggota keluarga pun menilai pelayanan sangat baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” tutur politisi dapil Sulawesi Selatan I itu.

Menanggapi Kunjuran Kerja BURT DPR RI Direktur RS Grestelina Hadikusuma menyambut dengan baik dan bangga karena RS Grestelina mendapatkan kepercayaan dari PT. Jasindo untuk melayani para legislator beserta keluarganya. “Kami dari pihak rumah sakit akan selalu meningkatkan pelayanan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Untuk para Anggota DPR kami perlakukan secara khusus, untuk permintaan alat pendeteksi kanker kami akan berupaya, namun alat tersebut sangat mahal,” tutup Hadikusuma. ■ rh/es



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, usai melantik Herman Hery sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senin (15/7). Foto: Geraldi/HR



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan materi pada seminar pembekalan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Administrasi Anggota Dewan di Gedung DPR RI, Senin (15/7). Foto: Andri/HR



Tim Kunlap Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dipimpin Kepala Bagian Penerbitan Dadang Prayitna melaksanakan monitoring dan evaluasi pendistribusian Majalah dan Buletin Parlemen di PT. Nusantara Card Semesta, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (15/7). Foto: Rizka/HR

